

**JURNAL**  
**REHABILITASI SEBAGAI HAK KORBAN TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ANAK**



**Disusun oleh :**

**MARIA ELISABETH SUNGGA**

<b>NPM</b>	<b>: 100510457</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**REHABILITASI SEBAGAI HAK KORBAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ANAK**



**Diajukan oleh :**

**MARIA ELISABETH SUNGGA**

<b>NPM</b>	<b>: 100510457</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**Telah disetujui**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal : 18 Juni 2014**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS**

**Tanda tangan :**

A handwritten signature in black ink, likely belonging to P. Prasetyo Sidi Purnomo, is written above the "Tanda tangan :" label.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. G. Sri Nurhartanto SH., LL.M**

The signature of Dr. G. Sri Nurhartanto is written in black ink over a horizontal line. To the left of the signature is the official stamp of the Faculty of Law, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, which is a circular purple stamp with a book icon and the university's name.

- i. Judul : Rehabilitasi Sebagai Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak
- ii. Nama : Maria Elisabeth Sungga, Nama Pembimbing: P. Prasetyo Sidi Purnomo
- iii. Program studi: Ilmu Hukum, Fakultas: Hukum, Universitas: Atmajaya Yogyakarta
- iv. Abstrac

The title of this essay is rehabilitation as a right of crime victims of child trafficking. The legal issues is rehabilitation of victims of child trafficking crime is going according to the laws and regulations that exist. The analysis this essay, is used legal normative juridical with focus on the posotive norms, related the Refugees Convention. The process of rehabilitation is necessary for victims of child trafficking crime that it become the responsibility of the government to provide a means of rehabilitation. Government through the Department of Social've run the command with the law by providing a means for the rehabilitation process.

Conclusion is adding expertise to maximize to victims of crime of trafficking in children.

*Key words: Rehabilitation, Child, Victim,s Trafficking*

## **v. Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dengan melihat realitas anak-anak dewasa ini, memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat, di antaranya termaksud di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa di dunia.

Masalah perdagangan manusia (Human Trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang berlarut-larut, yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan manusia tersebut. Perdagangan manusia (human trafficking) berkaitan erat dengan hubungan antar negara, karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan modus operasi yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima. Lemahnya penjagaan dan keamanan daerah perbatasan menjadikan faktor utama perdagangan manusia, sehingga dengan mudah seseorang dapat melakukan transaksi perdagangan tersebut.

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari “perbudakan manusia”. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran hakat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang diberbagai Negara, termaksud Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>1</sup>

Perempuan dan anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga menjadi korban tindak pidana

---

<sup>1</sup> Moh. Hatta, 2012, Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.

perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan anak kebanyakan dilakukan untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktis sejenis itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.<sup>2</sup>

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP, selanjutnya pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau untuk dijual.<sup>3</sup> Namun yang terjadi saat ini pelaksanaan dari peraturan yang ada lebih mengarah pemberantasan para pelaku tindak pidana saja tidak melihat bagaimana seharusnya korban dari tindak pidana tersebut dilakukan atau dilindungi haknya sebagai korban.

Perlindungan kepada anak sebagai korban, selain diwujudkan dalam bentuk dipidanya pelaku juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak-hak korban tindak pidana perdagangan anak dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Salah satu pemenuhan hak anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang adalah hak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah (pasal 51).

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm. 6

<sup>3</sup> Ibid, hl, 8

Dalam penjelasan undang-undang tersebut bahwa rehabilitasi kesehatan maksudnya adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis. Rehabilitasi sosial maksudnya adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi mental social dan pengembalian keberfungsian sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Dengan dilaksanakan proses rehabilitasi atau pemulihan tersebut maka anak sebagai korban akan memperoleh haknya untuk dapat kembali hidup di masyarakat umum dan menjadi tunas-tunas bangsa yang merupakan penerus masa depan bangsa.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apakah rehabilitasi korban perdagangan anak telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada?”

## vi. Isi Makalah

### A. Tinjauan Umum Tentang Rehabilitasi Sebagai Hak

#### 1. Pengertian Rehabilitasi

Pada hakekatnya sejak manusia menyadari dan menghawatirkan hidupnya serta kesejahteraan sesama manusia, sejak itu pula upaya-upaya rehabilitasi telah dilakukan. Dalam sejarahnya, praktek rehabilitasi sudah cukup lama dilaksanakan.

---

<sup>4</sup> Farhana, M.Pdi,2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.181.

Berdasarkan tulisan Marco Polo pada perjalanannya ke Kaisaran Mongol, ia mencatat bahwa pada saat itu para petugas patroli jalanan selalu melakukan kegiatan terhadap orang-orang yang mengalami kecacatan dan kelemahan lainnya.<sup>5</sup>

Rehabilitasi berasal dari dua kata, yaitu *re* yang berarti kembali dan *habilitasi* yang berarti kemampuan. Menurut arti katanya, rehabilitasi berarti mengembalikan kemampuan. Rehabilitasi adalah proses perbaikan yang ditujukan pada penderita cacat agar mereka cakap berbuat untuk memiliki seoptimal mungkin kegunaan jasmani, rohani, sosial, pekerjaan dan ekonomi.

## **2. Tujuan, Sasaran dan Fungsi Rehabilitasi**

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya.<sup>6</sup> Ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya.

Sasaran rehabilitasi adalah individu sebagai suatu totalitas yang terdiri dari aspek jasmani, kejiwaan, dan sebagai anggota masyarakat. Sasaran rehabilitasi cukup luas, karena tidak hanya terfokus pada penderita cacat saja, tetapi juga kepada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua dan keluarga penca, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta organisasi sosial yang terkait.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Widati, 1984, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*, Bandung: PLB FIP IKIP, hlm. 1-3

<sup>6</sup> <http://rian-plbuns2012.blogspot.com/2012/10/pengertian-rehabilitasi.htm>, Rian Istiningtias, Pengertian Rehabilitasi, hlm 1, download tanggal 4 feb 2014

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 20

Pada umumnya, rehabilitasi yang diberikan kepada peserta didik berkelainan berfungsi untuk pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), atau pemulihan/pengembalian (rehabilitatif), dan pemeliharaan/penjagaan (promotif).

Fungsi pencegahan, melalui program dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi peserta didik dapat menghindari hal-hal yang dapat menambah kecacatan yang lebih berat/ lebih parah/ timbulnya kecacatan ganda. Melalui kegiatan terapi, bagian-bagian tubuh yang tidak cacat dapat ditambah kekuatan dan ketahanannya, sehingga kelemahan pada bagian tertentu tidak dapat menjalar ke bagian lain yang telah cukup terlatih. Dengan demikian penyebaran kecacatan dapat dicegah dan dibatasi atau dilokalisasikan.

Fungsi penyembuhan/pemulihan, melalui kegiatan rehabilitasi peserta didik dapat sembuh dari sakit, organ tubuh yang semula tidak kuat menjadi kuat, yang tadinya tidak berfungsi menjadi berfungsi, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang semula tidak mampu menjadi mampu, dan lain sebagainya. Dengan demikian fungsi penyembuhan dapat berarti pemulihan atau pengembalian atau penyegaran kembali.

Fungsi pemeliharaan/penjagaan, bagi peserta didik yang pernah memperoleh layanan rehabilitasi tertentu diharapkan kondisi medik, sosial, dan keterampilan organ gerak/keterampilan vokasional tertentu yang sudah dimiliki dapat tetap terpelihara/tetap terjadi melalui kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang dilakukan.

### **3. Prinsip Dasar, Bidang Pelayanan, dan Kode Etik Rehabilitasi**

Szymanski menyatakan bahwa prinsip dasar filosofi rehabilitasi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Setiap orang menganut nilai-nilainya sendiri dan itu harus dihormati.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 22



- b. Setiap orang adalah anggota dari masyarakatnya, dan rehabilitasi seyogyanya memupuk agar orang itu diterima sepenuhnya oleh masyarakatnya.
- c. Aset-aset yang terdapat dalam diri individu seyogyanya ditekankan, didukung, dan dikembangkan.

Bidang/aspek pelayanan rehabilitasi dapat digolongkan menjadi tiga bidang, yaitu: bidang kesehatan/medik, bidang sosial, psikologis, dan bidang pekerjaan/pekerjaan/keterampilan.<sup>9</sup>

#### 1. Rehabilitasi Kesehatan/Medik

Rehabilitasi kesehatan/medik merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran baru, yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh dari penderita yang mengalami gangguan fungsi/cidera (*impairment*), kehilangan fungsi/cacat (*disability*) yang berasal dari susunan otot tulang (*musculoskeletal*), susunan otot syaraf (*neuromuscular*), susunan jantung dan paru-paru (*cardiovascular and respiratory system*), serta gangguan mental sosial dan pekerjaan yang menyertai kecacatannya.

#### 2. Rehabilitasi Sosial

Pengertian rehabilitasi sosial adalah suatu rangkaian kegiatan professional dalam upaya mengembalikan dan meningkatkan kemampuan warga masyarakat baik perorangan, keluarga maupun kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar, dan dapat menempuh kehidupan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.

#### 3. Lingkungan Pondok Sosial

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 35-37

Lingkungan pondok sosial adalah usaha rehabilitasi secara komprehensif dan integratif bagi penyandang permasalahan sosial termasuk penca di suatu perkampungan sosial dalam rangka refungsionalisasi dan pengembangan baik fisik, mental, maupun sosialnya.

#### 4. Rehabilitasi Psikologis

Rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari proses rehabilitasi penca yang berusaha untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi semaksimal mungkin pengaruh negatif yang disebabkan oleh kecacatan terhadap mental penca serta melatih mempersiapkan mental mereka agar siap dan mampu menyesuaikan diri di masyarakat.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban**

#### **1. Pengertian, Hak dan Kewajiban Anak**

Dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 butir 1 menegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan tunas-tunas bangsa yang merupakan penerus masa depan bangsa, maka anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan spiritual.

Materi hukum mengenai hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:<sup>10</sup>

- a. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (*Survival rights*), yaitu Hak-hak Anak dalam Konvensi hak anak meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Rights of Life*) dan hak untuk memperoleh standart kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The Rights to The Highest standar of Health and Medical care Attainable*).

<sup>10</sup>UNICEF, *Guide to the Convention of the Rights of the Child(CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm 4

- b. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*), yaitu Hak Anak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*), yaitu hak-hak pendidikan (Formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standart hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*The Rights of a Child to Express her/his Views in all Matters Affecting That Child*)

## 2. Pengertian, Hak dan Kewajiban Korban

Korban menurut Arif Gosita memberikan pengertian mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>11</sup>

Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
2. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
3. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
4. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
5. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;

---

<sup>11</sup> Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985, hlm.41

6. Hak untuk diberi tahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron lari dari tahanan;
7. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpah korban;
8. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.<sup>12</sup>

Ada beberapa kewajiban umum dari korban kejahatan, antara lain:

1. Kewajiban untuk tidak melakukan upaya main hakim sendiri atau balas dendam terhadap pelaku ( tindak pembalasan );
2. Kewajiban untuk mengupayakan pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana;
3. Kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai mengenai terjadinya kejahatan kepada pihak yang berwenang;
4. Kewajiban untuk tidak mengajukan tuntutan yang terlalu berlebihan kepada pelaku;
5. Kewajiban untuk menjadi saksi atas suatu kejahatan yang menimpa dirinya, sepanjang tidak membahayakan bagi korban dan keluarganya;
6. Kewajiban untuk bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi.<sup>13</sup>

### **C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Anak dan Implementasi Hak Korban Tindak Perdagangan Anak**

---

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm.53.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 55.

## **1. Pengertian tindak pidana perdagangan anak**

Pengertian perdagangan orang dapat dilihat pada Pasal 546 RUU KUH Pidana. Pasal 546 RUU KUH Pidana menyatakan: “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengiriman, penyerah terimaan orang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, pengekangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan, atau penjeratan utang, untuk tujuan mengeksploitasi atau perbuatan yang dapat tereksploitasi orang tersebut, dipidana karena melakukan tindak pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori VI”.

## **2. Ruang Lingkup dan Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 dirumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang, yaitu:

- a. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
- b. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
- c. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;

- d. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
- e. Setiap orang yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
- f. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;

Ada beberapa Faktor terjadinya tindak pidana perdagangan anak yaitu sebagai berikut :

- a. Kemiskinan (permasalahan ekonomi)

Himpitan perekonomian membuat keluarga khususnya orangtua semakin mudah terbujuk rayu oleh agen atau pelaku perdagangan anak dengan iming-iming serta janji palsu akan pekerjaan yang dapat membuat hidup lebih baik lagi dengan gaji yang besar.

- b. Kurangnya pendidikan dan informasi

Kekurangtahuan akan informasi mengenai perdagangan anak membuat orang-orang lebih mudah untuk terjebak menjadi korban perdagangan anak khususnya di pedesaan dan terkadang tanpa disadari pelaku perdagangan anak tidak menyadari bahwa ia sudah melanggar hukum.

- c. Terbatasnya kesempatan kerja

Ketidakjelasan akan pekerjaan membuat orang menjadi pasrah dalam menerima pekerjaan untuk dipekerjakan sebagai apa saja dan hal ini yang membuat para pelaku menargetkan anak sebagai korban.

### 3. Implementasi Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Subakir selaku Kepala Bagian Anak Pemerintah Dinas Sosial DIY, menurut beliau tindak pidana perdagangan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kecenderungan meningkat namun ia yakin bahwa banyak terjadi perdagangan anak di DIY namun sedikit saja yang memiliki kesadaran untuk melapor kepada pihak yang bewajib, karena sangat disayangkan banyak pelaku tindak pidana perdagangan anak ini adalah orang tua dari anak sendiri. Menurut Beliau tindak pidana perdagangan anak ini bisa dikatakan seperti “fenomena gunung es”.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa “Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang”. Dan dalam hal ini Pemerintah Dinas Sosial DIY telah melaksanakan tugas yang diberikan undang-undang kepada mereka dengan menyediakan sarana bagi korban tindak pidana perdagangan anak berupa rehabilitasi.

Pemerintah Dinas Sosial DIY telah membuka selter yang melayani korban tindak pidana perdagangan orang baik bagi perempuan dewasa dan bagi anak-anak di wilayah DIY dengan 4 kabupaten dan kotanya telah ada selter-selter tersebut namun di daerah Wonosari Gunung Kidul tidak merepakan selter korban tindak pidana perdagangan anak namun lebih kepada kekerasan terhadap anak namun Beliau mengatakan bahwa pada dasarnya perdagangan anak sendiri merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap

anak. Pada intinya pemerintah sudah berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial DIY dalam menangani maraknya tindak pidana perdagangan anak terutama masalah rehabilitasi, dimana menurut Bapak Subakir kendala utama yakni masalah pendanaan yang terbatas sehingga rutinitas yang harus dilaksanakan seperti sosialisasi dan berbagai kegiatan lainnya tidak bisa berjalan sesering mungkin dan tidak bisa sampai pada daerah-daerah yang susah ditempuh.

Selain masalah pendanaan adapun masalah sumber daya manusia dimana walaupun di DIY telah menyiapkan beberapa selter di tiap kabupaten kotanya namun untuk korban tindak pidana perdagangan anak yang korbannya di eksploitasi sebagai pekerja seks ada kecenderungan mengalami cacat mental yang sangat serius, seperti contohnya seorang anak dijual ibunya untuk di jadikan pekerja seks komersial padahal usia anak tersebut baru 12 tahun setelah diusut kasusnya dan anak tersebut direhabilitasi anak tersebut ternyata mempunyai keinginan besar untuk terus melakukan hubungan seks dan tidak melihat apakah dia mendapat uang atau tidak untuk masalah seperti ini di DIY belum bisa mengatasi hal seperti ini sehingga dengan cara lain maka korban tersebut dikirim ke selter di Solo, Jawa Tengah.

### **vii. Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui penelitian dengan menggunakan teori, sumber hukum dan pendapat narasumber dapat diambil kesimpulan bahwa Pemerintah Daerah Istimewah Yogyakarta melalui Dinas Sosial, telah



melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dengan menyediakan sarana untuk proses rehabilitasi korban tindak pidana perdagangan anak. Pemerintah DIY melalui dinas sosial telah menyediakan selter disetiap kabupaten/kota untuk melayani berbagai bentuk rehabilitasi terhadap korban tindak pidana perdagangan anak.

### **viii. Daftar Pustaka**

#### **Buku :**

Arif Gosita, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Moh. Hatta, 2012, *Teori dan Praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang* , Liberty, Yogyakarta

Sri Widati, 1984 Psiko, *Rehabilitasi Sosial logis*, PLB FIP IKIP, Bandung.

#### **Website :**

<http://rian-plbuns2012.blogspot.com/2012/10/pengertian-rehabilitasi.htm>,

RianIstiningtias, Pengertian Rehabilitasi, hlm 1, download tanggal 4 feb 2014

UNICEF, *Guide to the Convention of the Rights of the Child(CRC)*, UNICEF, Jakarta, hlm 4